

para pencari keadilan atau aparat hukum dapat memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung. SEMA yang berfungsi *beleidsregel* tetapi mengatur persoalan hukum acara seharusnya wajib diubah menjadi bentuk peraturan Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adam, Richard C., Gunadi, Ariawan dan Farrell, Mahira. *Anatomi Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).
- Ali, Zainudin. *Metode Penulisan Hukum*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011).
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. (Malang: UMM Press, 2020).
- Isharyanto. *Teori Hukum, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. (Jakarta: WR, 2016).
- Lontoh, Rudy A. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: PT. Alumni, 2001).
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. (Bandung: PT. Alumni, 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

Sanjaya, Umar Haris. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: NFP Publishing, 2014).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841).

## **JURNAL/MAKALAH**

Asnan, M. F., Adhim, N., & Ardani, M. N. “Kajian Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun (Studi Kasus Nomor 101/Pdt. SusPkpu/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst.)”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 11, No. 2, Tahun 2022.

Budianto, E. W. H. “Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review”. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*. Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.

Endang Pratiwi dkk. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 2, Tahun 2022.

Hakim, A. R. “Pengaruh Kondisi Ekonomi Makro Dan Proses Manajemen Risiko Kredit Terhadap Non-Performing Loan (Studi Kasus Pada Bank X)”. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 11, No. 2, Tahun 2017.

Jenifer, A. “Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 5, No. 3, Tahun 2024.

- Maulana. “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan Muḍārabah)”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 14, No. 1, Tahun 2014.
- Nadirah. “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2021.
- Nasution, M. L., Sunarmi, S., & Robert, R. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021)”. *Recht Studiosum Law Review*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2023.
- Purnomo, G. E., & Irawan, A. D. “Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara”. *Media of Law and Sharia*. Vol. 5, No. 3, Tahun 2024.
- Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”. *Aktual Justice*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.
- Riza Mediana. “Tanggung Jawab Pengembang (Developer) Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Terkaitketidaan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Apartemen 45 Antasari Jakarta Selatan)”. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 2, No. 2, Tahun 2019.
- Simanjuntak, A. T. B. “Kedudukan Perjanjian Sewa Dalam Upaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Hukum Indonesia*. Vol. 2, No. 4, Tahun 2023.
- Simaremare, S. P., Nasution, B., Sunarmi, S., & Yunara, E. “Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.
- Stefanie, C., & Kartikasari, R. “Keabsahan Keadaan Solven Debitor sebagai Dasar Pertimbangan dalam Perkara Kepailitan”. *Media Iuris*. Vol. 5, No. 1, Tahun 2022.

- Tektona, R. I., Ali, M., & Suindro, A. “Kepastian Hukum Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan Berdasarkan Parate Executie”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol. 1, No. 3, Tahun 2023.
- Wahyudi, H., & Seroja, T. D. “Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerjapasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 18, No. 1, Tahun 2023.

## **INTERNET**

Hukum Online. Resha Agriansyah Partnership Ajak Masyarakat Pahami Kontroversi SEMA No. 3 Tahun 2023. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). 31 Agustus 2024.

## **LAMPIRAN**